
ANALISIS PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DINAS PU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Annisa¹ Budi Setiawan²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan STIA & P Annisa Dwi Salfaritz

²Prodi Ilmu Pemerintahan STIA & P Annisa Dwi Salfaritz

¹annisanadjemi33@gmail.com

²budisetiawan.brotherhood@gmail.com

Abstrak

Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai badan penyelenggara pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan atas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir berupaya untuk mewujudkan kinerja instansi yang optimal dalam kerangka pencapaian *good government* yang selama ini ingin dicapai dalam kehidupan bangsa. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa sistem yang ditetapkan pada kegiatan pengawasan pada dasarnya sudah tepat, namun yang menjadi kendala terkadang justru dari para "personil" selaku sumber daya pelaksananya. Melalui penelitian ini akan ditinjau pola pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan yang diterapkan dalam upaya mewujudkan *good government* oleh Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga indikator. Indikator *pertama* adalah persiapan kegiatan pengawasan pembangunan, *kedua* yaitu indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan dan yang *ketiga* adalah pelaporan dari kegiatan pengawasan pembangunan. Berdasarkan hasil dilapangan tentang hasil pengawasan terhadap pengawasan pembangunan di Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sepenuhnya terlaksana secara optimal atau tidak terealisasi 100%. Yang mana disebabkan karena dana yang tersedia tidak mencukupi, masih kurangnya Sumber daya Manusia, kurangnya sarana prasarana, dan masih adanya pegawai yang belum berpendidikan strata satu.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembangunan, Program Kerja

Abstract

The Public Works Department of Human Settlements and Irrigation of Ogan Komering Ilir Regency as the body that organizes supervision, inspection and guidance on the implementation of development in the Ogan Komering Ilir Regency area seeks to realize optimal agency performance within the framework of achieving good government which has long been desired to be achieved in the life of the nation. As explained, the system established for monitoring activities is basically correct, but sometimes the obstacles arise from the "personnel" as the implementing resources. Through this research, the supervision pattern in the implementation of development supervision implemented in an effort to realize good government will be reviewed by the Department of Public Works, Human Settlements and Water Resources of Ogan Komering Ilir Regency. The analysis in this research is based on three indicators. The first indicator is the preparation of development supervision activities, the second is the indicator for the implementation of development supervision activities and the third is reporting of development supervision activities. Based on the results in the field, the results of supervision of development supervision at the Public Works Department of Cipta Karya, Ogan Komering Ilir Regency have not been fully implemented optimally or not 100% realized. This is because the available funds are insufficient, there is still a lack of human resources, a lack of infrastructure, and there are still employees who do not have a first degree education.

Keywords: Monitoring, Development, Work Program

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terjadi perubahan paradigma desentralisasi Pemerintah Pusat ke arah desentralisasi Pemerintah daerah Otonomi sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Adanya perubahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam Susunan Organisasi Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir diatas. Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dipimpin oleh seorang Dinas yang mempunyai tugas dan fungsinya untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang bangunan gedung dan air serta tanggap darurat dalam bencana alam, sebagian tugas Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan dalam koordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pengukuran kinerja mencakup indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja yang secara rinci disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*) hasil (*outcome*), *benefit*, dan *impact*. Masukan berupa dana, jumlah sumber daya manusia (SDM) dan lainnya. Satuan untuk pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk: set, eksemplar, unit, rupiah, buah, dan lainnya.

Good government akan tercapai jika lembaga pengawasan dan pemeriksa berfungsi secara baik. Apabila lembaga pengawas dan pemeriksa telah tertata dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki teknik pengawasan dan pemeriksaaan. Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengawasan yang diterapkan Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka mewujudkan *good government*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengawasan pelaksanaan pembangunan pada Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka mewujudkan *good government*?
2. Bagaimana hasil pengawasan dari pelaksanaan pembangunan yang diterapkan pada Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka mewujudkan *good government*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengawasan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan pada Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka mewujudkan *good government*.
2. Untuk mengetahui hasil pengawasan yang diterapkan pelaksanaan pembangunan pada Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka mewujudkan *good government*.

LANDASAN TEORI

A. Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya sangat diperlukan di dalam setiap instansi, lembaga, departemen maupun perusahaan-perusahaan. Fungsinya adalah untuk mengontrol kegiatan yang berlangsung dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengertian pengawasan secara sederhana menurut Sumosudirjo (1983: 130) adalah proses membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan tolak ukur/kriterianya, dan diikuti dengan tindakan perbaikan atau koreksi. Pengawasan menurut Runchyat Kosasih dalam Sumosudirjo (1983: 130) adalah fungsi dan proses manajemen yang diciptakan dalam organisasi dimana kegiatan-kegiatan suatu organisasi diupayakan secara kontinyu, agar sesuai dengan rencana tindakan yang diinginkan dan rencana yang diselaraskan dengan tujuan organisasi.

B. Fungsi Pengawasan

Pengawasan mempunyai fungsi yang penting dalam suatu kegiatan. Adapun Fungsi pengawasan akan mendapatkan hasil yang diharapkan, apabila dalam pelaksanaannya harus mengikuti norma pengawasan. Menurut Sujamto (1989: 18) norma pengawasan adalah "...patokan, kaidah atau ukuran yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan agar tercapai mutu pengawasan yang dikehendaki...". Upaya pencapaian tujuan dari kegiatan pengawasan dapat tercapai apabila dalam pelaksanaannya mengikuti norma-norma pengawasan. Secara umum norma pengawasan menurut Sujamto (1989: 19) adalah:

1. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan bagaimana perbaikannya.
2. Pengawasan merupakan proses berlanjut yaitu dilaksanakan terus-menerus sehingga dapat diperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
3. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan.
4. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan gairah untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menerbitkan penyempurnaan kondisi objek pengawasan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan berkaitan erat dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Variabel pengawasan tidak terlepas dari dimensi pemeriksaan dan pertanggungjawaban, dimana dalam melakukan suatu pengawasan terdapat tindakan pemeriksaan yang nantinya akan dimintai suatu pertanggungjawaban. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk mencari kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan untuk diperbaiki agar tidak terulang lagi pada masa yang akan datang.

C. Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Government*)

Pengertian *government* diartikan sebagai pemerintah, pemerintahan atau dapat juga diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *government* sebagai “*the state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikannya sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*” (Mardiasmo, 2004: 23).

Pengertian *good government* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank (dalam Mardiasmo, 2004: 24) mendefinisikan *good government* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

D. Mewujudkan *Good Government* Melalui Pengawasan

Bastian (2007: 2) menjelaskan bahwa perkembangan paradigma pemerintahan di berbagai negara merupakan suatu proses dalam penciptaan pemerintah yang berhasil guna, berdayaguna, dan berkeadilan. Hal tersebut telah menimbulkan kesadaran setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan berkualitas. Secara umum pengawasan merupakan proses investigasi independent terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pengawasan merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau instansi pengelola aktiva negara lainnya.

Good government akan tercapai jika lembaga pengawas dapat berfungsi dengan baik (Mardiasmo, 2004: 218). Apabila lembaga pengawas telah tertata dengan baik maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki teknik pengawasan. Salah satunya adalah dengan memperkuat pelaksanaan audit kinerja.

Karakter *good government* yang dapat dibangun atau digunakan dalam pola pengawasan antara lain (www.lakipdepkeu):

1. Penegakan hukum/*rule of law*,
2. Transparansi,
3. dan akuntabilitas.

Pembangunan karakter penegakan hukum terkait dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Target pelaksanaan karakter ini adalah untuk mengungkapkan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi. Pengembangan karakter transparansi bertujuan untuk memastikan apakah setiap keputusan dan pelaksanaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, dan karakter akuntabilitas bertujuan untuk mengetahui siapa bertanggung jawab kepada siapa dan kebenaran apa yang dipertanggungjawabkan. Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukannya dengan menggunakan berbagai jenis kegiatan audit.

Transparansi mensyaratkan bahwa setiap perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi relevan sebelum kebijakan dijalankan. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterima (Mardiasmo, 2004: 107).

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan pemeriksaan. Pemerintah, daerah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya, dan diberi penjelasan (Mardiasmo, 2004: 226).

Audit kinerja adalah pengauditan yang dilakukan untuk memeriksa tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program/kegiatan dan unit kerja tertentu (Mardiasmo, 2004: 218). Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Hal tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi karena nantinya DPR/DPRD, menteri-menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik pusat maupun di daerah, harus memberikan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa akuntabilitas publik juga merupakan bagian penting dari sistem politik dan demokrasi.

Hasil dari kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Cipta Karya

dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Isi dari LAKIP tersebut adalah merupakan bentuk penyampaian pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi yang telah digariskan sebelumnya. Keberadaan LAKIP tersebut merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 yang berisikan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Penggunaan metode dikarenakan data-data yang dikumpulkan diperoleh melalui hasil pencatatan dan analisis dari pertanyaan-pertanyaan penelitian sehingga diperoleh informasi yang obyektif, valid dan konsisten. Budd (dalam Bungin, 2003: 134) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengelola pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator terpilih. Pengujian keakuratan data, akan digunakan triangulasi data dalam metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkenaan dengan bahasan penelitian, pola pengawasan pelaksanaan pembangunan di Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterapkan Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka mewujudkan *good government* dilihat dari tiga indikator, yaitu:

1. Persiapan kegiatan pengawasan, yang ditinjau dari:
 - a. Penentuan area yang akan diawasi,
 - b. Jangka waktu pelaksanaan pengawasan,
 - c. Personel yang dibutuhkan,
 - d. Sumber daya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan.
 2. Pelaksanaan pengawasan, yang ditinjau dari:
 - a. Inspeksi terhadap dokumen dan catatan,
-

- b. Wawancara dengan personel instansi/dinas yang berkenaan dengan unsur struktur pengendalian,
 - c. Pengamatan atas kegiatan yang menjadi objek pengawasan.
3. Pelaporan, yang ditinjau dari terbitnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan untuk setiap instansi pemerintahan ataupun proyek pembangunan di desa-desa yang termasuk dalam lingkup pengawasan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pola-pola yang diterapkan Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara tersusun atau terencana. Hal tersebut terlihat dari adanya Program Kerja Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan yang dibuat oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai kegiatan pengawasan rutin atau reguler yang dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan penanganan kasus khusus ditangani secara khusus dengan menetapkan anggota tim pengawasan dan pemeriksaan melalui penegasan disposisi dari bupati maupun kepala dinas. Hal tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kegiatan pengawasan yang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan dan persiapan, proses pelaksanaan hingga tahap akhir yaitu pertanggungjawaban kegiatan pemeriksaan.

Apabila ditinjau dari hasil yang diperoleh dari pola yang diterapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah terarah pada upaya pencapaian *good government*. Hal tersebut terlihat dari sistem pengawasan yang telah terprogram sesuai dengan tahapan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Namun terdapat temuan yang menjelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan gedung Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain; kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan serta adanya tumpang tindih kegiatan pengawasan rutin atau kasus ataupun tugas kantor lainnya. Kurangnya sumber daya manusia yang ada lebih berkenaan dengan kurangnya keterampilan di bidang pemeriksaan, karena sebagian pemeriksa yang ada belum memiliki sertifikat auditor. Kurangnya sumber dana tersebut berkenaan dengan dana yang tersedia tidak mencukupi untuk dilakukannya kegiatan pemeriksaan reguler dengan objek yang banyak. Tumpang tindih kegiatan tersebut berkenaan dengan waktu pemeriksaan

yang terbatas sehingga seorang pegawai bisa jadi tidak fokus seratus persen dalam melaksanakan kegiatannya.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan lebih meningkatkan kemampuan personel pengawasan melalui kegiatan pelatihan guna mendapatkan sertifikasi pengawasan pembangunan di Kabupaten OKI. Hal tersebut dimaksudkan agar personel tim pengawasan dapat menganalisis masalah/temuan yang ada secara cepat dan tepat. Memanajemen waktu secara tepat melalui penjadwalan terperinci mengenai waktu pengawasan dan pelaksanaan dengan pelaksanaan tugas kantornya lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Pengaturan susunan personel yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan tugas kantor pun dapat dilakukan sebagai cara untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Mengenai masalah pendanaan dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan secara tepat dalam setiap kegiatannya agar objek pemeriksaan reguler yang ada dapat secara rutin dilakukan. Selain itu hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan kinerja dari kantor/instansi maupun unit lainnya yang terdapat di Kabupaten OKI sebagai bentuk untuk mewujudkan *good government*.

Selain faktor internal yang menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan juga terdapat faktor eksternal yang dihadapi Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Tidak kooperatifnya objek pengawasan dan pemeriksaan juga menjadi kendala untuk menyelesaikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan tepat pada waktunya. Contohnya objek pemeriksaan tidak memberikan data yang dibutuhkan tepat waktu. Mengatasi hal tersebut Inspektorat memberikan surat teguran kepada objek pemeriksaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola pengawasan pelaksanaan pembangunan yang diterapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mewujudkan *good government* diperoleh dua kesimpulan, yaitu: Pola pengawasan pelaksanaan pembangunan yang diterapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir bila ditinjau dari indikator yang telah ditentukan yaitu: persiapan kegiatan pengawasan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelaporan. Berdasarkan penelitian dari indikator-indikator tersebut diperoleh temuan bahwa oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan kegiatan pengawasan secara terpola atau secara sistematis. Pola kegiatan pengawasan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan

Komerling Ilir tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan rangkaian kegiatan Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin. LAKIP memuat kegiatan pengawasan pembangunan yang akan dilakukan mulai dari perencanaan pengawasan sampai pada tahapan laporan dari kegiatan pemeriksaan. Adapun pola yang diterapkan Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan adalah dengan melakukan perencanaan/persiapan, proses pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LAKIP) Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin secara keseluruhan belum mencapai 100 persen tetapi hanya 83,03% secara keseluruhan. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir guna mencapai terlaksananya *good government*. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain; pertama sumber daya manusia (personel) yang telah memiliki sertifikasi pengawas pembangunan masih sedikit, dimana dari 28 jumlah keseluruhan pegawai hanya 5 orang yang telah mengikuti sertifikasi pengawas, padahal melalui sertifikasi tersebut profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas dapat ditingkatkan. Kedua kurangnya sumber daya keuangan. Ketiga, adanya tumpang tindih kegiatan pengawasan rutin atau kasus ataupun tugas kantor lainnya karena waktu pemeriksaan yang terbatas.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti guna meningkatkan kinerja pengawasan pelaksanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan *good government* dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain: *pertama* adanya penambahan dana dan jumlah personel dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan. *kedua* Lebih meningkatkan kemampuan personel pengawasan melalui kegiatan pelatihan sertifikasi pelaksanaan pembangunan. *Ketiga* Memanajemen waktu secara tepat melalui penjadwalan terperinci mengenai waktu pengawasan dan pelaksanaan tugas kantornya lainnya. *Empat* Melakukan perhitungan dan perincian biaya pengawasan secara

tepat dalam setiap kegiatannya agar pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan objek reguler yang ada dapat secara rutin dilakukan.

REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002.

Bastian, Indra. *Audit Sektor Publik Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Bohari. *Organisasi dan Manajemen*, Alfabeta, Jakarta, 1995.

Bukhari. *Kegiatan Pengawasan di Sektor Publik*, Grafindo, Jakarta, 2007.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hamidi. *Metode Penelitian Sosial di Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 2004.

Keban, Jeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gramedia, Yogyakarta, 2004.

Lakip Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2012.

Makhfatih (1997) melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Makhfatih pengukuran kinerja Pemda dapat dilakukan dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). *Tesis*. (tidak dipublikasikan).

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, And, Yogyakarta, 2004.

Murthi, dkk (2006) melakukan penelitian tentang kemampuan kinerja perusahaan agar dapat memberi arah kepada keputusan strategi yang berhubungan dengan perkembangan suatu organisasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan analisis DEA untuk mengukur efisiensi relatif dari suatu unit pengambilan keputusan yang didalamnya banyak *input* dan *output*. *Jurnal Ilmiah Edisi XVI, Volume 41*. Universitas Hasanuddin Makasar. (tidak dipublikasikan).

Pedoman Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012.

Pattipeiluhu (2001) meneliti tentang “akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Tesis*. (tidak dipublikasikan).

Siagian, Sondang P. *Pengawasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Soewarno. *Pengawasan Dalam Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 1999.

Sujamto. *Administrasi Kepegawaian*, Intan Persada, Jakarta, 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Sumosudirjo. *Pengawasan*, Arkola, Jakarta, 1983.

Tangkalisan. *Kinerja Organisasi Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Undang –Undang

Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
